



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tanggung Jawab Great Power: Studi mengenai
Intervensi Amerika Serikat terhadap Konflik Suriah**

Skripsi

Oleh

Muhammad Gugi Amouresna

2014330049

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BN-PT/Akred/S/XI/2014

**Tanggung Jawab Great Power: Studi mengenai
Intervensi Amerika Serikat terhadap Konflik Suriah**

Skripsi

Oleh

Muhammad Gugi Amouresna

2014330049

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira

Bandung

2018



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Gugi Amouresna

NPM : 2014330049

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Tanggung Jawab Great Power: Studi mengenai
Intervensi Amerika Serikat terhadap Konflik Suriah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 30 Juli 2018



Muhammad Gugi Amouresna

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Muhammad Gugi Amouresna
NPM : 2014330049
Judul : Tanggung Jawab Great Power: Studi mengenai
Intervensi Amerika Serikat terhadap Konflik
Suriah

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada 18 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira


Anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 
: 
: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

ABSTRAK

Nama : Muhammad Gugi Amouresna
NPM : 2014330049
Judul : Tanggung Jawab Great Power: Studi mengenai Intervensi
Amerika Serikat terhadap Konflik Suriah

Penelitian ini menjawab pertanyaan “Bagaimana tanggung jawab Great Power mendorong Amerika Serikat untuk melakukan intervensi terhadap konflik Suriah?”. Kerangka pemikiran pada penelitian ini didasari oleh teori English School dari Robert Jackson dan Hedley Bull mengenai tanggung jawab *Great Power* dalam komunitas internasional. Ada pun konsep-konsep pendukung yang dijadikan pedoman penulis dalam mencari data yaitu konsep *Great Power*, intervensi, dan konflik bersenjata. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan mencari data melalui studi pustaka. Seiring dengan panjangnya rentang waktu pada kasus yang dipilih, penulis telah menentukan batasan waktu pada masalah yang dikaji yaitu periode 2011-2015 dan memfokuskan pembahasan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu memberi gambaran mengenai tanggung jawab *Great Power* AS dalam konflik Suriah. Pada bagian analisis akan dibahas bahwa status *Great Power* yang dimiliki AS membuatnya memiliki tanggung jawab nasional, internasional, dan kemanusiaan yang harus dipenuhi dalam konflik Suriah. Temuan pada penelitian ini memperlihatkan bahwa konflik Suriah berada dalam ruang lingkup tanggung jawab AS yang telah meluas karena status *Great Power* yang dimilikinya.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Intervensi, *Great Power*, Tanggung Jawab *Great Power*, Konflik bersenjata, Suriah.

ABSTRACT

Name : Muhammad Gugi Amouresna
Student ID : 2014330049
Title : Tanggung Jawab Great Power: Studi mengenai Intervensi
Amerika Serikat terhadap Konflik Suriah

This research seeks to answer the question of “How did Great Power responsibility drive the United States to conduct intervention towards Syrian conflict?”. The theoretical framework of this research is inspired by the work of English School theorists such as Robert Jackson and Hedley Bull regarding Great Power responsibility in international affairs. In addition, the author also relies on concepts as a guideline on compiling data about Great Power, intervention, and armed conflict. This research focuses on US’ Great Power responsibility in Syrian conflict particularly within 2011-2015 period. By using qualitative method, the data were selected and compiled through literature review. In the analysis section, there will be a discussion about the main argument of this research that its Great Power status generates national, international, and humanitarian responsibilities for the US in Syrian conflict. Findings of this research show that Syrian conflict is within the area of US’ responsibility that has expanded as a consequence of its Great Power status.

Keywords: United States, Intervention, Great Power, Great Power Responsibility, Armed conflict, Syria

KATA PENGANTAR

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini. Berikut adalah nama-nama yang menurut saya layak untuk diabadikan bersama skripsi saya:

Pertama, terima kasih kepada ibu saya yang selalu menjadi sumber inspirasi saya untuk selalu bekerja keras dan menjadi orang yang bermanfaat. Banyak ilmu yang saya pelajari selama di Unpar tetapi tidak ada satu pun yang lebih berharga dari yang saya dapat dari ibu tercinta.

Kedua, terima kasih kepada pembimbing saya, Mas Nyoman, yang tidak hanya selalu mengingatkan saya untuk berpikir tetapi juga mengajarkan saya apa arti menjadi seorang akademisi.

Ketiga, terima kasih kepada seluruh teman saya sesama mahasiswa HI Unpar khususnya Anton, Suman dan Ichsan yang merupakan orang-orang terdekat bagi saya selama masa kuliah. Terima kasih juga kepada Nindyo dan Yuma, walaupun hari-hari jomblo kita sudah berakhir mungkin nanti ada waktunya masa-masa itu terulang lagi.

Keempat, terima kasih kepada geng swole (Ahsya, Nastya, Kika, Almo) yang telah memasukan elemen kebugaran ke dalam hidup saya pada masa-masa akhir kuliah di Unpar. *Despacito*.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1. Deskripsi Masalah	4
1.2.2. Pembatasan Masalah	7
1.2.3. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian	8
1.4. Tinjauan Pustaka	8
1.5. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.6.1. Metode Penelitian.....	17
1.6.2. Teknik pengumpulan data.....	17
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	20
PIHAK-PIHAK, KEPENTINGAN DAN KEKERASAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH	20
2.1 Pihak-Pihak serta Kepentingan dalam Konflik Bersenjata di Suriah.....	20
2.1.1 Rezim Bashar Al-Assad	21
2.1.2 Pihak Oposisi	25

2.1.3 Kelompok Jihadis.....	29
2.2 Kekerasan dalam Konflik Suriah	32
BAB III.....	41
AMERIKA SEBAGAI GREAT POWER DAN INTERVENSI TERHADAP KONFLIK SURIAH	41
3.1 Amerika Serikat sebagai Great Power: Keunggulan Militer, Politik, dan Ekonomi	41
3.1.1 Keunggulan Militer	42
3.1.2 Keunggulan Politik.....	46
3.1.3 Keunggulan Ekonomi	49
3.2 Intervensi Amerika Serikat terhadap Konflik Suriah	51
BAB IV.....	57
TANGGUNG JAWAB GREAT POWER AMERIKA SERIKAT DALAM INTERVENSI TERHADAP KONFLIK SURIAH	57
4.1 Konflik Suriah sebagai Ancaman terhadap Komunitas Internasional	57
4.2 Tanggung Jawab Great Power dalam Intervensi Amerika Serikat.....	61
4.2.1. Tanggung Jawab Internasional: Menjaga Balance of Power, Mengontrol Krisis, dan Membatasi Perang di Konflik Suriah	63
4.2.2. Tanggung Jawab Kemanusiaan: Memperjuangkan Hak Asasi Manusia di Suriah .	67
4.2.3 Tanggung Jawab Nasional: Melindungi Keamanan Amerika Serikat	69
4.2.3.1 Melawan Ancaman dari ISIS	71
4.2.3.2. Memusnahkan senjata kimia di Suriah	76
BAB V.....	80
KESIMPULAN.....	80
Daftar Pustaka.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Tokoh Pendukung Assad	24
Tabel 2.2 Komponen Koalisi Nasional Suriah	27
Tabel 2.3 Jumlah Korban Jiwa di Konflik Suriah 2014	34
Tabel 3.1 Daftar negara kontributor dana kepada PBB tahun 2014	47
Tabel 3.2 Daftar Sanksi Amerika Serikat terhadap Suriah	52
Tabel 4.1 Jenis Senjata Kimia dan Dampaknya	77

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

Diagram 2.1 Populasi Suriah Berdasarkan Sekte	37
Diagram 2.2 Produk Domestik Bruto Suriah 2011-2014	38
Diagram 3.1. Perbandingan Pengeluaran Militer AS dengan P5	43
Diagram 3.2. Pengeluaran Militer Amerika Serikat	44
Diagram 3.4. Perbandingan PDB Amerika Serikat, India dan Tiongkok	57
Diagram 4.1 Jumlah serangan terbanyak teroris pada tahun 2015	74
Diagram 4.2 Jenis Serangan yang dilakukan ISIS pada tahun 2013	75
Gambar 3.1 Wilayah ISIS di Suriah dan Irak	81

DAFTAR SINGKATAN

Amerika Serikat (AS)

Free Syrian Army (FSA)

Hak Asasi Manusia (HAM)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS)

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)

Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Research, Development, Test and Evaluation (RDT&E)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Intervensi terhadap konflik Suriah membuka babak baru bagi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sebelum Suriah, beberapa negara telah menjadi target intervensi negara *Great Power* ini di antaranya adalah Irak dan Libya. Intervensi yang dilakukan tidak selalu secara multilateral seperti pada kasus Irak yang dilakukan secara unilateral. Jelas tidak semua negara dapat melakukan hal tersebut karena sumber daya yang dibutuhkan jumlahnya sangat besar. Akan tetapi, sebagai negara *Great Power*, AS memiliki kapasitas untuk melakukan intervensi terhadap negara yang bahkan berada di benua yang berbeda.

Kawasan Timur Tengah sangat rentan terhadap konflik antara pemerintah dan rakyatnya. Pada tahun 2011, rangkaian protes dan demonstrasi yang berujung konflik terjadi di sepanjang wilayah Timur Tengah mulai dari Tunisia, Mesir, Libya hingga Suriah. Fenomena ini dimulai dari aksi bakar diri seorang pedagang di Tunisia sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.¹ Aksi ini menginspirasi masyarakat di negara lain yang kemudian mendorong terjadinya rangkaian protes di beberapa negara Arab atau ‘Arab Spring’ sebagaimana rangkaian protes tersebut ditulis di media.² Dampak dari fenomena ini bermacam-macam mulai

¹ Ricardo Laremont, “Revolution, Revolt and Reform,” *Revolution, Revolt and Reform in North Africa: The Arab Spring and Beyond*, ed. Ricardo Laremont, (Routledge: New York, 2014), Hlm 1.

² Hamid Dabashi, *The Arab Spring: The End of Postcolonialism*, (Zed Books: New York, 2012), Hlm 3.

dari pergantian rezim di Tunisia, dilakukannya intervensi militer di Libya hingga konflik di Suriah yang tidak kunjung usai. Dalam angka, konflik antara pemerintah dan rakyat telah menyebabkan 65.000 orang hilang di Suriah, 435.000 orang mengungsi di Libya, dan 22.000 orang ditangkap di Mesir.³ Dengan banyaknya masalah dari fenomena ini yang belum tuntas, dapat dibilang bahwa Timur Tengah merupakan kawasan yang sangat tidak aman.

Konflik Suriah merupakan salah satu konflik yang masih berlangsung dan terus berkembang setiap tahunnya. Mirip dengan yang terjadi di beberapa negara Arab ketika fenomena ‘Arab Spring’ berlangsung, rangkaian protes dan demonstrasi dilakukan oleh rakyat Suriah terhadap pemerintah. Demonstrasi ini pada awalnya dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad yang dikenal represif dan otokratis seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di Suriah.⁴ Respon pemerintah yang menggunakan kekerasan membuat demonstrasi semakin sering dilakukan dan diwarnai dengan kekerasan. Tensi antara demonstran dengan pemerintah mulai meluap ketika terjadi penembakan terhadap empat demonstran oleh aparat keamanan Suriah pada 15 Maret 2011.⁵ Seiring dengan bertambahnya korban, rakyat Suriah membentuk kelompok oposisi dalam upayanya melawan rezim Assad. Di jalur politik rakyat Suriah melawan rezim tersebut melalui *Syrian National Council* sedangkan perlawanan militer dilakukan oleh *Free Syrian Army*.⁶

³ Amnesty International, “The ‘Arab Spring’: Five Years on,” diakses pada 19 April 2018. <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/>.

⁴ John McHugo, *Syria: A History of the Last Hundred Years*, (The New Press: New York, 2014).

⁵ Ibid.

⁶ Ken Sofer dan Juliana Shafroth, “The Structure and Organization of the Syrian Opposition,” Center for American Progress, diakses pada 19 Februari 2018,

Terdapat berbagai isu di konflik Suriah yang membuatnya patut dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara di sekitarnya bahkan negara yang secara geografis jauh dari Suriah. Isu yang pertama sekaligus paling berbahaya adalah isu keamanan baik nasional, regional maupun internasional. Di dalam negeri, Suriah telah menjadi arena pertempuran antara pemerintah, kelompok oposisi, dan kelompok Islamis yang memperebutkan kekuasaan di beberapa wilayah. Hal ini menjadi permasalahan keamanan regional ketika beberapa negara berkepentingan mulai memberikan bantuan sumber daya kepada pihak-pihak tersebut.⁷ Di tingkat internasional, konflik Suriah menjadi ancaman seiring dengan berkembangnya kelompok teroris di negara tersebut yang memanfaatkan keadaan untuk memperkuat jaringannya. Selain isu keamanan, konflik Suriah juga menimbulkan isu sosial yaitu lebih dari tujuh juta warga terpaksa meninggalkan rumahnya baik untuk mengungsi ke daerah lain maupun ke luar negeri.⁸

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Suriah mulai dari diplomasi Kofi Annan, *Arab League Peace Plan*, hingga Konferensi Geneva tetapi tidak satupun upaya tersebut yang berhasil memperbaiki situasi di Suriah.⁹ Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB karena konflik Suriah melibatkan Rusia dan Amerika Serikat di pihak yang berbeda. Negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, Turki dan Qatar menjadi aktor yang turut berperan dalam keberlangsungan konflik di Suriah dengan bantuan yang diberikan

<https://www.americanprogress.org/wpcontent/uploads/2013/05/StructureAndOrganizationSyrianOpposition-copy.pdf>.

⁷ Christopher Phillips, *The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East*, (Yale University Press: London, 2016).

⁸ Amnesty International, Op. Cit., "The 'Arab Spring': Five Years on".

⁹ Christopher Phillips, Op. Cit., 2016.

kepada pihak-pihak yang didukungnya.¹⁰ Pada akhirnya, konflik Suriah menjadi konflik yang melibatkan banyak aktor baik aktor nasional maupun internasional yang merupakan negara ataupun non-negara.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Konflik Suriah telah lama menjadi masalah bagi Amerika Serikat dan terus memburuk pada empat tahun pertama konflik tersebut berlangsung. AS pertama kali menyatakan posisinya dalam konflik tersebut pada Agustus 2011 dengan memanggil Assad untuk mendengarkan keinginan rakyatnya dan turun dari kursi kepresidenan.¹¹ Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak berdampak signifikan dan kekerasan terus berlanjut di Suriah. Pada awalnya, konflik Suriah tidak menjadi fokus AS karena konflik tersebut dianggap sebagai urusan dalam negeri yang tidak membutuhkan campur tangan negara lain. Hingga pada akhirnya konflik Suriah mulai menarik perhatian AS secara lebih besar ketika rezim Assad dilaporkan menggunakan senjata kimia dan menewaskan banyak warga di Suriah pada tahun 2013.¹² Merespon hal tersebut, AS menyatakan akan melancarkan serangan militer terhadap rezim Assad.¹³ Akan tetapi, serangan tersebut tidak

¹⁰ Ibid.

¹¹ Macon Phillips, "President Obama: "The future of Syria must be determined by its people, but President Bashar al-Assad is standing in their way." The White House, diakses pada 19 Februari 2018, <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2011/08/18/president-obama-future-syria-must-be-determined-its-people-president-bashar-al-assad>.

¹² The Press Office, Government Assessment of the Syrian Government's Use of Chemical Weapons on August 21, 2013. The White House, diakses pada 19 Februari 2018, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-2>

¹³ Ibid.

pernah dilakukan karena Rusia bergerak cepat untuk meredakan tensi antara kedua pihak dengan menjadi mediator yang berujung kepada lahirnya kesepakatan antara AS-Rusia-Suriah terkait penghancuran senjata kimia milik rezim Assad.¹⁴

Konflik Suriah memasuki babak baru bagi AS ketika kelompok teroris *Islamic State* yang selanjutnya dikenal sebagai *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS) mulai berkembang di Suriah.¹⁵ Kelompok ini berakar dari kelompok di Irak yang telah menjadi musuh AS selama bertahun-tahun. Keadaan di Suriah yang sedang tidak aman akibat dari konflik yang sedang terjadi menyebabkan kelompok ini dapat memanfaatkan situasi yang ada untuk melakukan rekrutmen dan memperluas jaringan terorismenya. Bahkan kelompok tersebut berhasil menarik ribuan orang dari luar Suriah untuk bergabung dan ikut berperang di negara tersebut.¹⁶ Tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh AS yang telah bertahun-tahun memerangi kelompok teroris. Pada September 2014, AS mengumumkan akan melakukan serangan militer terhadap kelompok tersebut. Serangan tersebut dilakukan kepada setidaknya 20 titik di Raqqa dan dilakukan dengan koordinasi bersama Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirate Arab dan Jordania.¹⁷

Banyaknya warga Suriah yang pergi keluar negeri untuk mengungsi menyebabkan negara di sekitarnya untuk menyediakan tempat dan bantuan bagi

¹⁴ Laura Smith-Spark dan Tom Cohen, "U.S., Russia agree to framework on Syria chemical weapons," CNN, diakses pada 19 Februari 2018, <https://edition.cnn.com/2013/09/14/politics/us-syria/index.html>.

¹⁵ Charles R. Lister, *Syrian Jihad: Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of Insurgency*, (Oxford University Press: New York, 2015), Hlm 119.

¹⁶ Jim Sciutto, Mariano Castillo dan Holly Yan, "U.S. airstrikes hit ISIS inside Syria for first time," CNN, diakses pada 19 Februari 2018, <https://edition.cnn.com/2014/09/22/world/meast/u-s-airstrikes-isis-syria/index.html>.

¹⁷ "Syrian Refugee Flows Security Risks and Counterterrorism Challenges," Homeland Security Committee, diakses pada 19 Februari 2018, https://homeland.house.gov/wp-content/uploads/2015/11/HomelandSecurityCommittee_Syrian_Refugee_Report.pdf.

orang-orang tersebut. Lebih dari 4 juta orang telah keluar dari Suriah untuk mengungsi dan kurang lebih 500.000 di antaranya pergi ke negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.¹⁸ Salah satu hal yang membuat perpindahan warga secara masif ini menjadi berbahaya adalah adanya kemungkinan bahwa terdapat teroris yang menyamar sebagai pengungsi. Pada tahun 2015, dilaporkan bahwa salah satu pelaku aksi terorisme di Paris memasuki wilayah Eropa sebagai pengungsi dan di Jerman terdapat sepuluh kasus terkait dengan dugaan pergerakan kelompok teroris melalui jalur yang sama.¹⁹ Hal ini mempersulit AS dalam mencegah jaringan terorisme meluas ke wilayahnya karena AS juga menerima cukup banyak pengungsi dari Suriah.

Situasi di Suriah dianggap sebagai konsekuensi dari sikap AS yang terlalu pasif saat tahun-tahun awal konflik berkembang.²⁰ AS hanya merespon ketika peristiwa besar telah terjadi seperti penggunaan senjata kimia dan pergerakan kelompok teroris di Suriah. Bahkan keterlibatan Rusia dalam konflik tersebut tidak membuat AS menjadi lebih agresif. Presiden Obama menyatakan bahwa dunia tidak lagi dalam sebuah Perang Dingin sehingga keberadaan Rusia di Suriah tidak mengancam AS.²¹ Hal ini memunculkan pertanyaan apakah intervensi menjadi sebuah keharusan bagi AS dalam konflik yang tidak memiliki hubungan dengan negaranya dan mengapa seakan-akan situasi di Suriah adalah hasil dari kesalahan AS ketika upaya seluruh negara untuk menyelesaikan konflik tersebut

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid.

²⁰ David Fitzgerald dan David Ryan, Obama, *US Foreign Policy and the Dilemmas of Intervention*, (Palgrave Macmillan: Basingstoke, 2014), Hlm 114.

²¹ Jennifer Epstein, "Obama: No 'Cold War chessboard'," Politico, diakses pada 20 Februari 2018, <https://www.politico.com/story/2014/02/barack-obama-press-conference-russia-syria-ukraine-103707>.

juga tidak berhasil. Jika hal ini dikaji maka pembahasan akan merujuk kepada perbedaan tanggungjawab yang dimiliki AS dibandingkan dengan negara-negara lain.

Fenomena ini menarik untuk dibahas karena sudut pandang yang diambil di luar dari kajian pada umumnya yang membahas kepentingan sebuah negara. Kasus ini memunculkan pertanyaan ketika pada dasarnya setiap negara itu setara, bagaimana mungkin tanggungjawab yang dimilikinya berbeda dan ada negara yang tanggungjawabnya lebih besar. Selain menarik, penelitian mengenai kasus ini juga dapat bermanfaat untuk memahami mengapa AS berbeda dengan negara lain dan mengapa sebagai sebuah negara AS sangat penting dalam hubungan internasional.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penulis telah menentukan batasan waktu dan fokus penelitian dalam membahas kasus yang dipilih. Pembahasan dan data yang digunakan dibatasi pada periode 2011-2015. Penelitian berfokus pada tanggung jawab *Great Power* yang mendorong Amerika Serikat untuk melakukan intervensi terhadap konflik bersenjata di Suriah.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu:

“Bagaimana Tanggung Jawab *Great Power* Mendorong Amerika Serikat untuk Melakukan Intervensi terhadap Konflik Bersenjata di Suriah?”

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tanggungjawab Great Power yang mendorong Amerika Serikat untuk melakukan intervensi.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah kegunaan yang ingin dicapai oleh penelitian ini:

1. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam studi hubungan internasional mengenai tanggung jawab *great power* Amerika Serikat dalam konflik Suriah.
2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai konflik yang terjadi di Suriah dan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat.

1.4. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa buku yang telah membahas atau sedikit menyinggung permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. Buku yang pertama berjudul “*The United States and Great Power Responsibility: Drones, Rendition and Invasion*”. Buku ini digunakan sebagai salah satu acuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Buku karya Wali Aslam ini membahas aktivitas unilateral AS dalam beberapa kasus dengan menggunakan pendekatan English School. Penelitian difokuskan kepada tanggung jawab *Great Power* dalam komunitas internasional dengan argumen bahwa *Great Power* memiliki tanggung jawab lebih dalam

menjaga norma dan hukum yang ada. Akan tetapi, Aslam memfokuskan penelitiannya untuk mengukur apakah tindakan suatu negara merupakan tindakan yang bertanggungjawab. Menurutnya, tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tanggungjawab dalam sebuah aksi adalah legalitas, legitimasi dan kebijaksanaan pada aksi yang dilakukan.²² Kerangka ini dijadikan alat untuk menganalisis tiga kasus yang melibatkan Amerika Serikat yaitu invasi Irak, serangan drone di Pakistan dan praktik *rendition* dalam melawan terorisme. Hasilnya, seluruh tindakan AS pada kasus yang dibahas dinilai tidak bertanggung jawab karena tidak memenuhi tolak ukur yang disediakan dalam kerangka analisis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan menjangkau area yang belum disentuh oleh buku ini yaitu kasus kontemporer seperti konflik Suriah. Selain itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur apakah aksi AS di Suriah bertanggungjawab melainkan bagaimana tanggungjawab yang dimilikinya mendorong AS melakukan aksi tertentu.

Buku kedua yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis berjudul “*Obama, US Foreign Policy and the Dilemmas of Intervention*” karya David Fitzgerald dan David Ryan. Secara umum, buku ini membahas beberapa kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah. Buku ini berusaha menjelaskan pandangan Obama mengenai kasus-kasus seperti invasi Irak dan Afghanistan, intervensi di Libya dan dilema intervensi di Suriah. Analisis dilakukan menggunakan fakta-fakta di lapangan dan pandangan dari tokoh-tokoh politik Amerika Serikat. Argumen utama dalam buku ini adalah Obama melihat kekuatan AS tidak hanya

²² Wali Aslam, *The United States and Great Power Responsibility: Drones, Rendition and Invasion*, (Routledge, New York, 2013) Hlm 21-32.

terpusat pada kekuatan militer tetapi juga pada instrumen kebijakan luar negeri lain seperti diplomasi.²³ Hal ini ditunjukkan pada kasus konflik Suriah yang menghadapkan Obama kepada dua pilihan yaitu melakukan aksi militer atau tidak. Pertimbangan untuk melakukan intervensi dijelaskan dengan fakta-fakta intervensi AS di masa lalu dan juga pernyataan dari pejabat pemerintah AS di masa sekarang. Terdapat perdebatan pendapat mengenai dilema di Suriah, tetapi pada akhirnya Obama tetap memegang prinsipnya untuk tidak menurunkan pasukan militer ke konflik yang akan menjadi beban bagi AS di masa mendatang. Buku ini memberi pembahasan yang jelas mengenai bagaimana AS melihat konflik Suriah dan juga pertimbangan dibalik keputusan AS untuk tidak melakukan intervensi militer. Akan tetapi, tidak dijelaskan apakah AS harus melakukan intervensi di luar dari kepentingan yang dimilikinya. Buku ini terfokus pada intervensi militer dan tidak membahas secara detail mengenai intervensi lain yang sebenarnya dilakukan oleh AS di Suriah. Penelitian yang dilakukan penulis membahas intervensi AS sebagai sebuah tanggungjawab bukan sebagai upaya mengejar kepentingan nasional. Oleh karena itu, pembahasan akan berbeda walaupun data yang digunakan mungkin sama. Selain itu, buku ini fokus kepada perdebatan internal domestik sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas topik ini dengan mengesampingkan perdebatan di dalam domestik AS dan berfokus pada pembahasan di area internasional.

²³ David Fitzgerald and David Ryan, *Op. Cit.*, 2014. Hlm 130

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam meneliti masalah yang telah ditentukan, penulis menggunakan kerangka dari teori English School dengan fokus pada ide tentang tanggungjawab *Great Power* dalam tatanan internasional. Konsep utama dari English school mengacu pada perbedaan antara sistem internasional dengan komunitas internasional. Konsep *international society* atau komunitas internasional yaitu sebuah komunitas yang terdiri dari kumpulan negara-negara yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai bersama; terikat oleh aturan-aturan yang dibuatnya dalam berhubungan satu sama lain.²⁴ Komunitas internasional merupakan solusi untuk mengakomodasi pluralitas pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh negara-negara.²⁵ Dengan adanya aturan dan norma yang telah dibuat dan disetujui bersama dalam komunitas, setiap negara anggotanya memiliki hak dan juga tanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan tatanan yang ada yaitu pola atau disposisi aktivitas internasional yang menyokong tujuan-tujuan komunitas negara yaitu memelihara sistem dan komunitas itu sendiri, mempertahankan kemerdekaan atau kedaulatan eksternal negara, dan menjaga perdamaian.²⁶ Oleh karena itu, berbeda dengan Realisme yang membahas sistem internasional sebagai dunia anarki dan penuh dengan kepentingan, English School menekankan adanya aturan, norma, dan kepentingan bersama yang membentuk tatanan internasional

²⁴ Hedley Bull, *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*, (Macmillan: Basingstoke, 1997), Hlm 13.

²⁵ T. Dunne, *Inventing International Society: A History of the English School*, (Macmillan: Houndmills, 1998), Hlm 11.

²⁶ Hedley Bull, Op. Cit., 1997. Hlm 8.

tanpa mengesampingkan asumsi bahwa setiap negara memiliki nilai dan kepentingan masing-masing.

Terdapat dua pendekatan dalam English School yaitu pluralisme dan solidarisme yang memiliki perbedaan pandangan mengenai perang dalam komunitas internasional, sumber hukum internasional, dan status individu.²⁷ Pluralisme menekankan nilai-nilai negara dan tatanan internasional sebagai hal terpenting yang harus dilindungi oleh negara. Pluralis berpendapat bahwa nilai manusia seperti Hak Asasi Manusia sulit untuk disetujui oleh semua negara sehingga negara harus berfokus pada nilai-nilai yang dapat disetujui bersama seperti prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Di sisi lain, solidarisme menekankan bahwa nilai manusia juga penting untuk dilindungi karena perlindungan nilai manusia dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap tatanan internasional sehingga individu harus dianggap sebagai anggota komunitas internasional. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia harus dilindungi oleh seluruh negara.

Baik pluralisme maupun solidarisme keduanya mengakui bahwa negara *Great Power* memiliki status yang berbeda dari negara lain dalam komunitas internasional. Negara *Great Power* adalah negara yang memiliki keunggulan signifikan dibandingkan dengan negara lainnya dalam bidang militer, politik serta ekonomi dan dapat mempengaruhi banyak negara melalui kebijakannya.²⁸ Keunggulan militer sebuah negara dapat dilihat dari sumber daya strategis yang

²⁷ Hedley Bull, "International Theory: The Case for a Classical Approach," *World Politics*, 42 vol. 4, Hlm 361-377.

²⁸ Robert Jackson, *The Global Covenant: Human Conduct in a World of States*, (Oxford University Press: New York, 2000) Hlm 173

dimilikinya yaitu anggaran pertahanan, tenaga manusia, institusi penelitian dan pengembangan, dan basis industri pertahanan.²⁹ Dalam bidang politik, keunggulan suatu negara dapat dilihat dari pengaruh ideologi, pengaruh budaya dan pengaruh institusional yang dimilikinya.³⁰ Dalam bidang ekonomi, negara *Great Power* memiliki nilai yang besar pada Produk Domestik Bruto yang merupakan tolak ukur dalam menilai perekonomian sebuah negara melalui perhitungan jumlah produk dan jasa yang dihasilkan dalam negeri.³¹

Negara *Great Power* merupakan pelindung perdamaian dan keamanan internasional.³² Keunggulan yang dimilikinya atas negara lain membuatnya memiliki tanggung jawab lebih dalam melindungi tatanan internasional. Tanggungjawab diartikan sebagai tuntutan dan ekspektasi dalam bertindak.³³ Sederhananya, seorang pegawai diberikan tanggungjawab untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan (tuntutan) dan diharapkan bertindak bertanggungjawab sesuai dengan aturan yang ada (ekspektasi). Karena tidak ada entitas yang lebih kuat dari negara untuk memberikan tanggungjawab baik tuntutan maupun ekspektasi kepada negara, tanggungjawab negara lahir dari kesepakatan yang dibuat bersama. Menurut Robert Jackson, tanggungjawab negara terdiri dari tanggungjawab nasional, tanggungjawab internasional, dan tanggungjawab kemanusiaan.³⁴ Terdapat beberapa cara bagi *Great Power* dalam memenuhi tanggung jawabnya

²⁹ Ashley J. Tellis et. al, *Measuring National Power in the Postindustrial Age*, (RAND: Santa Monica, 2000) Hlm 136-142

³⁰ Stephen M. Walt, *Taming American Power: The Global Response to U.S. Supremacy*, (W.W Norton: New York, 2005)

³¹ Mankiw, *Principles of Macroeconomics* 5th ed, (South-Western College Pub: Toronto, 2008), hlm 16.

³² Robert Jackson, Op. Cit., 2000, Hlm 201.

³³ Ibid, 138.

³⁴ Robert Jackson, Op. Cit., 2000, Hlm 170-177.

untuk menjaga tatanan internasional yaitu (i) menjaga *Balance of Power*, (ii) menghindari atau mengontrol krisis, dan (iii) menghentikan dan membatasi perang.³⁵ Oleh karena itu, ketika suatu konflik bersenjata yang diartikan sebagai situasi di mana terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan eksklusif menggunakan kekerasan sebagai instrumen terjadi, peristiwa tersebut dapat berada dalam cakupan tanggungjawab *Great Power*.³⁶

Tanggung jawab nasional menyangkut kewajiban negara untuk memastikan keberlangsungan kehidupan rakyatnya melalui perlindungan keamanan nasional dari ancaman eksternal. Berbeda dengan keamanan nasional, ancaman terhadap keamanan internasional justru datang dari dalam komunitas sehingga negara *Great Power* dapat berdampak signifikan karena dengan seluruh keunggulan yang dimilikinya, negara *Great Power* dapat menekan negara lain untuk patuh terhadap tatanan yang ada. Dengan peran *Great Power*, keamanan internasional yaitu perdamaian, tatanan, hukum dalam komunitas dapat terlindungi. Dalam melindungi keamanan internasional, ada dua hal yang menjadi tanggung jawab *Great Power* yaitu menjaga *Balance of Power* dan hubungan antarsatu sama lain. Di sini *Balance of Power* diartikan sebagai keadaan di mana tidak ada negara yang memiliki kekuatan untuk membuat dan memberlakukan hukum terhadap negara lain.³⁷ Ada dua jenis *Balance of Power* yang harus dilindungi yaitu

³⁵ Hedley Bull, *Op. Cit.*, 1997. Hlm 235-242.

³⁶ Carolyn Pumphrey, "General Introduction," *Armed Conflict in Africa*, diedit oleh Carolyn Pumphrey, Rye Schwartz-Barcott, dan Triangle Institute for Security Studies, (The Scarecrow Press: Oxford, 2003) Hlm 4.

³⁷ de Vattel, *Droit des Gens*, J. B. Scott, *The Classics of International Law, Le Droit des Gens* (Washington: Carnegie Institute, 1916) Hlm 40.

General Balance dan *Local Balance*.³⁸ Yang pertama memiliki arti *Balance of Power* secara keseluruhan dalam sistem internasional sedangkan yang kedua berarti *Balance of Power* pada sebuah kawasan. *General Balance* penting untuk dilindungi agar tidak terlahir negara di atas negara di dalam sistem sedangkan *Local Balance* penting untuk mencegah sebuah negara menguasai negara lainnya. Dalam dunia English school, *Balance of Power* tidak hanya diartikan secara objektif dengan melihat keseimbangan kekuatan militer tetapi juga dilihat secara subjektif dari pandangan negara terhadap kekuatan satu sama lain.³⁹

Selain menjaga *Balance of Power*, negara *Great Power* juga memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam menjaga tatanan dengan cara menggunakan kekuatannya untuk membatasi perang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian mengenai pengembangan senjata dan mencegah serta menghentikan perang yang terjadi di sebuah kawasan. Pada dasarnya, *Great Power* memiliki tanggung jawab untuk mencegah suatu ancaman sebelum membahayakan keamanan internasional yang mungkin juga dapat berdampak pada *Balance of Power*. Konflik bersenjata dapat menjadi salah satu ancaman yang dapat menjadi tanggung jawab negara *Great Power*. Kehadiran pihak-pihak dengan kepentingan eksklusif dan kekerasan yang terjadi dapat menjadi masalah regional. Terdapat tiga jenis kekerasan yang dapat ditemui yaitu kekerasan langsung, struktural dan budaya. Kekerasan langsung adalah yang biasa disebut sebagai kekerasan fisik yang dilakukan secara sengaja dan langsung oleh kelompok atau individu tertentu dengan intensi untuk membunuh atau

³⁸ Hedley Bull, Op. Cit., 1997. Hlm 133-138.

³⁹ Ibid

menyakiti.⁴⁰ Kekerasan struktural dan kekerasan budaya berbeda dengan jenis yang sebelumnya karena kedua kekerasan ini wujudnya tidak terlihat secara langsung. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang lahir dari ketidakadilan dalam sistem sosial yang menyebabkan pihak tertentu tidak bisa mendapatkan haknya dalam bidang tertentu seperti edukasi dan sumber daya.⁴¹ Kekerasan budaya adalah kekerasan yang didorong atau dijustifikasi oleh aspek budaya seperti ideologi, agama, bahasa, seni, dan keilmuan.⁴² Dalam keadaan ini, intervensi dapat menjadi opsi selama tujuan yang ingin dicapai adalah perlindungan tatanan internasional. Intervensi yang dapat dilakukan bermacam-macam mulai dari diplomasi koersif, intervensi ekonomi, perang intensitas rendah, hingga intervensi militer.⁴³

Tanggung jawab negara *Great Power* dalam melindungi Hak Asasi Manusia lahir dari pandangan solidarisme tentang nilai-nilai manusia yang dianggap penting untuk dilindungi. Karena setiap individu dianggap sebagai bagian dari komunitas internasional, negara *Great Power* yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi komunitas harus melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu tersebut terlepas dari kewarganegaraan dan tempat individu tersebut tinggal. Pada akhirnya, kekuatan yang dimiliki negara *Great Power* memberinya

⁴⁰ Johan Galtung dan Dietrich Fischer, *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research*, (Springer: New York, 2013), Hlm 11.

⁴¹ Johan Galtung, "Violence, Peace and Peace Research Journal of Peace Research, Vol. 6 1970, Hlm 167-91

⁴² Johan Galtung, "Cultural Violence," *Journal of Peace Research*, Vol. 27, No. 3. (Agustus., 1990), Hlm 291-305

⁴³ Glenn J. Antizzo, *U.S Military Intervention in the Post-Cold War Era: How to Win America's War in Twenty-First Century*, (Louisiana State University Press: Louisiana, 2010) Hlm 8.

tanggung jawab yang besar atas keberlangsungan komunitas dan tatanan di dalamnya.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk memberi gambaran mengenai topik penelitian yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian berupa pemaknaan sebuah masalah melalui asumsi, pandangan, dan penggunaan lensa teori.⁴⁴ Penelitian dengan pendekatan kualitatif sangat bergantung pada data baik berupa teks maupun gambar sehingga data yang digunakan berasal dari banyak sumber.⁴⁵ Temuan penelitian akan berupa gambaran mengenai masalah yang dikaji yang proses penelitiannya terdiri dari melaporkan berbagai perspektif, mengidentifikasi faktor yang terlibat, dan memberikan gambaran umum.⁴⁶

1.6.2. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka yaitu menggunakan data dari buku, artikel, jurnal, dokumen resmi dan halaman web yang telah diperiksa kredibilitasnya.

⁴⁴ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2 ed. (Sage Publication, 2007), hlm 37.

⁴⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2 ed. (Sage Publication, 2009), hlm 174.

⁴⁶ John W. Creswell, Op. Cit., 2007, hlm 39.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang diawali dengan pendahuluan yang mencakup desain penelitian di antaranya seperti latar belakang masalah, metode penelitian dan pemaparan teori dan konsep pada kerangka pemikiran yang merupakan pegangan penulis dalam melakukan penelitian.

Pada Bab II dibahas variabel pertama pada penelitian ini yaitu konflik bersenjata di Suriah. Kerangka pembahasan diambil dari definisi milik Carolyn Pumphrey mengenai konflik bersenjata sehingga materi yang dibahas adalah pihak-pihak, kepentingan, dan kekerasan dalam konflik bersenjata di Suriah.

Variabel kedua yaitu Amerika Serikat sebagai Great Power dibahas pada Bab III dengan menggunakan definisi *Great Power* dari Robert Jackson dan Hedley Bull sebagai kerangka pembahasan. Bab III membahas keunggulan Amerika Serikat dalam bidang militer, politik dan ekonomi serta intervensi yang dilakukan negara tersebut terhadap konflik Suriah.

Bab IV berisi analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan teori English School mengenai tanggungjawab *Great Power* sebagai alat analisis.

Bab V yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan mengenai temuan-temuan dari penelitian ini berpegangan dengan teori dan konsep yang telah dipaparkan pada Bab I, menggunakan data pada Bab II dan Bab III, serta mempertimbangkan analisis pada Bab IV.